



B-1
ISBN : 978-979-17638-1-



PROSIDING SEMINAR

THE INDONESIAN NETWORK FOR AGROFORESTRY EDUCATION (INAFE)

Surakarta, 4 Maret 2008

PENDIDIKAN AGROFORESTRY SEBAGAI STRATEGI MENGHADAPI PEMANASAN GLOBAL

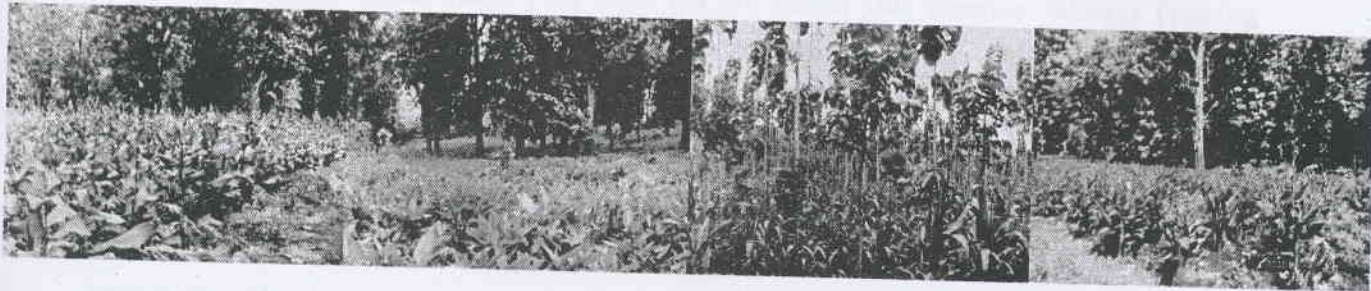
Penyunting :

Supriyono, Djoko Purnomo dan Parjanto

Diterbitkan oleh :
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008



ISBN : 978-979-17638-1-3



PROSIDING SEMINAR

THE INDONESIAN NETWORK FOR AGROFORESTRY EDUCATION (INAFE)

Surakarta, 4 Maret 2008

PENDIDIKAN AGROFORESTRY SEBAGAI STRATEGI MENGHADAPI PEMANASAN GLOBAL

Penyunting :

Supriyono, Djoko Purnomo dan Parjanto

**Diterbitkan oleh :
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal. i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 PENDAHULUAN - SAMBUTAN REKTOR UNS	 1
 MAKALAH KUNCI	
KEBIJAKAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DALAM MENURUNKAN PEMANASAN GLOBAL (MENTERI KEHUTANAN RI)	2
 MAKALAH UTAMA	
A. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan &Energi serta Mencegah Global Warming (Dewan Pengawas Perhutani – Muslimin Nasution)	5
B. Konservasi Air dengan Model Agroforestri dan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan (Ketua Inafe – Suhardi)	12
C. Peran Agroforestri dalam Menanggulangi Banjir dan Longsor DAS (Dekan FP UNS- Sekjen/Ketua FKPTPI - Suntoro Wongso Atmojo)	19
 MAKALAH PENUNJANG	
A. Kelompok A (Biofisik)	
1 Tinjauan Suksesi dan Regenerasi Alami pada Hutan Rakyat (Budiadi)	29
2 Peranan Hutan Dalam Upaya Pengendalian Banjir (C Nugroho Sulistyo Priyono, Ari Wibowo dan Yunita Lisnawati)	38
3 Peran Agroforestry dalam Konservasi Diversisitas Cacing Tanah (Widyatmani Sih Dewi, K. Hairiah, Herwin S., Rahmadia I.)	47
4 Pengaruh Perubahan Tegakan terhadap Erosi, Nisbah C/N, Bahan Organik, dan Berat Volume Tanah di DTA Sempor, Kabuptaen Kebumen, Jawa Tengah (Dwi Priyo Ariyanto, Bambang Hendro S dan Dja'far Shiddieq)	59
5 Layanan Ekologi Agroforestri Dalam Mempertahankan Diversitas Rayap Paska Alih Guna Hutan Menjadi Lahan Pertanian (Fitri Khusyu Aini, F.X. Susilo, Bagyo Yanuwiadi, dan Kurniatun Hairiah)	68
6 Peningkatan Efisiensi Energi Matahari Tegakan Jati: Pendekatan Umur, Kerapatan dan Tinggi Tajuk (Eko Murniyanto)	81
7 Laju Pertumbuhan dan Serapan Hara Kalsium Bibit Jati pada variasi Konsentrasi dan selang waktu Pemberian Pupuk Organik (Agus Suprpto)	89
8 Pengaturan Masukan Seresah Berbagai Sistem Agroforestry dalam mengurangi pencucian N-NO3(Syahrul Kurniawan dkk)	100

9	Kajian Naungan untuk Deteksi Potensi Sambiloto sebagai Tanaman Sela di Agroforestry (Bambang Pujiasmanto)	113
10	Arsitektur Tajuk Pohon Dalam Sistem Agroforestri Sederhana: Percabangan Dan Tipe Daun Sebagai Penentu Kecepatan Tetesan Tajuk (MTh. Sri Budiastuti)	120
11	Pengaruh bentuk penggunaan lahan terhadap infiltrasi di Sub DAS Ngrancah, Kulon Progo (Ambar Kusumandari, Firdaus I. Simorangkir, Harma Suryatmaja)	128
12	Penggunaan Sistim Tumpang Sari Pada Lahan Kelapa Sawit Untuk Agribisnis Jagung Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan(Erwin,Tengku Sabrina dan A.Rauf)	142
B. Kelompok B (Sosial Ekonomi)		
1	Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Padang Alang – Alang Dengan Pola Agroforestri Di Kawasan Hutan Lindung Riam Kanan Kalimantan Selatan (Mahrus Aryadi)	153
2	Pengaruh Implementasi PHBM Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Hutan(Prasodjo Hari Nugroho)	161
3	Pengaruh Utamaan Gender Dalam Konservasi Pekarangan Dengan Sistem Agroforestry Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Kemiskinan Di Propinsi Lampung (Christine Wulandari, Sugeng P. Harianto dan Afif Bintoro)	167
4	Agroforestry Untuk Pengentasan Kemiskinan Sekaligus Penyelamat Lingkungan (Abdul Rauf)	173
5	Agroforestry Repong Damar Krui dan kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat (Afif Bintoro, Hari Kaskoyo)	181
6	Analisis Usaha Tani Sistem Agroforestri Hutan Kayu Putih (Studi Kasus di LMDH Sido Rahayu Desa Boloh Kabupaten Grobogan) (Triyono)	188
7	Kajian Ekonomi Usaha tani pola tumpang sari di lahan hutan (Studi Kasus di RPH Citepus, BKPH Bokol,KPH Banyumas Barat Jawa-Tengah) (Triwara Buddhi Satyarini)	194
8	Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Berbasis tebu-Jati merupakan Wujud Agroforestry untuk pengentasan Kemiskinan (Agus Santosa)	204
9	Kajian Budidaya Aren dalam Sistem Agroforestry di Wilayah Jateng dan DIY (Rosi Widarawati, dkk)	213
10	Pengembangan Agroforestry untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan (Leti Sundawati)	219
11	Peranan Penanaman Tanaman Sela Di Kawasan Kehutanan Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Sekitar Hutan Di Resot Pemangkuhan Hutan Gunung Slamet Barat Kesatuan Pemangkuhan Hutan Banyumas Timur*)(Anny Hartati)	226
12	Pola agroforestri pada lahan kritis oleh kelompok tani hutan kemasyarakatan sedyo rukun di kabupaten gunung kidul (Danang Heroe Poernomo)	230

13	Pengembangan sistem agroforestri berbasis jarak pagar untuk mendukung program desa mandiri energi di Jawa Tengah (Samanhudi dkk.)	235
C. Kelompok C (Kebijakan dan Campuran)		
1	Program WIDYA: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agroforestri di Indonesia melalui pemanfaatan INHERENT (Indonesian Higher Education Network) (Much Taufik Tri Hermawan)	241
2	Analysis of cropping pattern of agroforestry practice in Cianjur Watershed (Hadi Pranoto, MA. Chozin Hadi Susilo Arifin, Edi Santoso)	246
3	Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Konsep untuk Pengentasan Kemiskinan (Eko Murdiyanto)	255
4	Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan hutan untuk Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Bantul(Budi widayanto)	263
5	Introduksi Budidaya Pule Pandak dalam Sistem Agroforestry Petani Hutan Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul (Sulandjari)	271
6	Analisis Rata-rata "Riap Tahunan Jenis Fabaceae Koleksi Kebun raya" Eka karya" Bali dalam mendukung Sistem Agroforestry (Bramantyo TA nugroho)	276
7	ADAPTASI DAN MITIGASI PEMANASAN GLOBAL: Bisakah Agroforestri Mengurangi Resiko Longsor Dan Emisi Gas Rumah Kaca (Kurniatun Hairiah, Widiyanto dan Didik Suprayogo)	286
8	Peran Pendidikan Agroforestri Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Ma'mum Sarma)	299
9	Peran Mikroorganisme Penambat Nitrogen Simbiotik dan Mikorisa pada Agroforestry di Pantai Samas (Handojo H. Nurjanto & Suhardi)	306
10	Pengembangan Biogas Pada Usaha Ternak Sapi Terpadu Sebagai Pendukung Konservasi Lahan Di Jawa Tengah (Muryanto)	312
HASIL RUMUSAN DAN NARRATIVE REPORT		323

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: SUATU KONSEP UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Eko Murdiyanto

Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRAK

Masyarakat Desa hutan saat ini dihadapkan dengan kebijakan pemerintah untuk tidak lagi mempraktekkan sistem pertanian perladangan, karena dianggap sebagai praktek yang merugikan dan merusak secara ekologis, ekonomi dan sosial hutan. Untuk itu Pemerintah melalui mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan masyarakat Desa hutan. Melalui regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan target integrasi pembangunan, yaitu kesejahteraan sosial ekonomi, kemandirian masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan yang dilaksanakan dengan Agroforestry. Regulasi ini diimplementasikan melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi (*tangible benefit*) dan manfaat sosial (*intangible benefit*) bagi masyarakat.

Persoalannya, program tersebut menghadapi kendala eksternal dan internal. Untuk itulah diperlukan suatu konsep lokalitas untuk memahami masyarakat sekitar yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Salah satu model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis kearifan lokal adalah agrosilvikultur yang dikembangkan di Desa Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Penanaman salak dalam program tersebut layak untuk diusahakan secara ekonomis selama jangka waktu 15 tahun dan memberikan keuntungan sosial yang berupa terbentuknya kelembagaan dan organisasi, munculnya solidaritas sosial dan terjaminnya konservasi lahan. Model ini mampu mengakomodasi kearifan lokal masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan, karena hutan merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi semata.

Kata kunci: *tangible benefit, intangible benefit, kearifan lokal*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan areal yang paling mudah dijarah oleh tangan manusia dalam menggapai tuntutan hidup, terutama oleh penduduk yang bermukim di sekitar hutan. Penduduk di Desa-Desa perbatasan melihat hutan yang ada disekelilingnya selain sebagai sumber kehidupan mereka juga sebagai cadangan bagi perluasan usahatani mereka ketika para petani itu membutuhkan tambahan lahan usahatani karena pertambahan penduduk. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya peralihan pola hidup dengan membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan mempercepat berkurangnya areal hutan. Tingkat kerusakan hutan di

pulau Jawa yang dikelola Perum Perhutani pada tahun 2002 sudah mencapai 500.000 hektar dan diperkirakan akan terus meningkat (Muhtadi, 2003).

Kerusakan hutan tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi, tetapi juga hutan lindung dan hutan alam. Eksploitasi berlebih (*over exploitation*), pembalakan tak legal (*illegal logging*), dan merembaknya perambahan kawasan hutan melengkapi proses destukturisasi hutan di Indonesia. Keadaan ini makin diperparah pula oleh adanya ketidakserasian kebijakan-kebijakan perekonomian, sosial dan politik menyangkut sumberdaya hutan hasil rumusan berbagai pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing, Menurut Sabarnuddin (2001) keadaan ini dapat memicu adanya persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Desa hutan.

Persoalannya, program tersebut menghadapi kendala eksternal dan internal. Kendala internal yang berupa karakteristik regulasi pemerintah justru menjadi kendala utama karena menghasilkan program dengan pendekatan *top down*, seragam dan sentralistik. Akibatnya banyak program yang terkendala kondisi daerah yang bersifat khas dan relativitas budaya yang berbeda. Kendala tersebut ditambah keterbatasan sumberdaya manusia yang paham terhadap kultur sosial budaya masyarakat dan lokasi Desa setempat.

Dalam pembinaan kawasan hutan, hal penting yang akan mempengaruhi pola kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan hutan adalah masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Hal ini karena keberadaan sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi kontribusi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Untuk itulah diperlukan suatu konsep lokalitas untuk memahami masyarakat sekitar yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, karena hutan merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi semata.

Melihat permasalahan tersebut pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan di pulau Jawa yang mendorong lahirnya sebuah sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat Desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang masuk petak pangkuan Desa. Perum Perhutani mengemas sistem tersebut dalam keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136 / KPTS / DIR / 2001. Salah satu pemerintah daerah propinsi, yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) No.

001/KPTS/DIR/2002 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu. Ketiga keputusan tersebut yang melandasi pengembangan sistem PHBM di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menunjang program ini maka dibentuk suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga ini beranggotakan masyarakat Desa di sekitar hutan yang nantinya akan ikut mengelola hutan bersama Perum Perhutani dalam program *agroforestry*. Tulisan ini memandang program *agroforestry* dari sudut sosiologi agar program *Agroforestry* yang berbasis kearifan lokal mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan keuntungan sosial bagi masyarakat.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

Menurut Husein (1992) sebagian besar areal hutan di pulau Jawa terletak pada daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani yang kehidupannya relatif masih rendah. Untuk itu perlu dikelola dengan baik agar dapat menesejahterakan masyarakat. Berdasarkan fungsi produksi hutan maka keberpihakan kepada rakyat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Jiwa yang terkandung dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Prinsip dasar PHBM meliputi Keadilan dan demokratis, Keterbukaan dan kebersamaan, Pembelajaran bersama dan saling keterbukaan, Kejelasan hak dan kewajiban, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Kerjasama kelembagaan, Perencanaan partisipatif, Kesederhanaan sistem dan prosedur, Pemerintah sebagai fasilitator, Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Oleh karena itu PHBM memiliki tujuan untuk (a) meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, (b) Meningkatkan peran dan tanggungjawab Perum Perhutani, masyarakat Desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, (c) Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktivitas dan

keamanan hutan dan (d) Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Desa hutan.

Guna mendukung keberhasilan PHBM maka dibentuk Forum Komunikasi PHBM Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Keanggotaan Forum Komunikasi Propinsi meliputi Gubernur, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Dinas Kehutanan serta Dinas/instansi terkait propinsi sesuai kebutuhan. Keanggotaan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten/Kota meliputi Bupati/Walikota, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota. Sedangkan keanggotaan Forum Komunikasi PHBM kecamatan dan Desa/Kelurahan diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Forum Komunikasi PHBM memiliki tugas (a) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM, (b). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM (c). Membantu kelancaran pelaksanaan PHBM dan (d). Melaporkan kegiatan PHBM seperti tercantum diatas kepada Gubernur bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Propinsi dan kepada Bupati/Walikota bagi Forum Komunikasi PHBM tingkat Kabupaten/Kota.

MODEL KERJASAMA PERUM PERHUTANI DENGAN LMDH (KASUS DESA SUKOHARJO, WONOSOBO)

Dalam sistem PHBM masyarakat Desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernota riil (mempunyai akta notaris), dimana lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perhutani. LMDH adalah lembaga masyarakat Desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan hutan, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga Desa dan atau unsur masyarakat yang ada di Desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. Pembentukan dan pemilihan pengurus berdasarkan pada musyawarah mufakat. Pembuatan nota riil terhadap lembaga yang telah dibentuk dimaksudkan untuk memperkuat posisi LMDH di mata hukum. Pihak-pihak yang bekerjasama adalah (a) Perum Perhutani, (b) LMDH, dan (c) Pihak lain yang berkepentingan: Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Usaha swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dilakukan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Perhutani setempat. Jangka waktu pengelolaan adalah sesuai daur. Obyek perjanjian mencakup petak-petak hutan yang masuk dalam pangkuan Desa dengan tidak merubah kawasan. Perjanjian tersebut dibuat dengan nota riil untuk memperkuat

posisinya di mata hukum. Dalam perjanjian kerjasama juga memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disamping itu ketentuan bagi hasil juga dibuat dalam perjanjian ini.

Model pengelolaan hutan di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo merupakan model *agroforestry* dengan bentuk *agrosilvikultur* karena mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian secara sadar dan dengan pertimbangan yang masak. Tanaman pokok atau tegakan dari program ini adalah tanaman mahoni yang ditanam pada tahun 1998 dan tanaman pertanian yang ditanam adalah tanaman salak serta sebagian ikut pula menanam tanaman kemukus yang menjadikan pohon mahoni sebagai obyek rambatannya. Pola tanamnya adalah dengan menanam salak pada sela-sela pohon mahoni dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau menyesuaikan dengan kondisi lahan. Alasan dipilihnya salak sebagai tanaman untuk *agrosilvikultur* di daerah ini adalah: salak merupakan komoditas primadona (disukai) di daerah ini karena sebagian besar penduduknya menanam salak di lahan masing – masing, penduduk setempat sudah menguasai bagaimana budidaya tanaman salak yang baik, buah salak yang dihasilkan daerah ini kualitasnya baik, harga buah salak yang cukup bersaing, dalam pemasarannya mudah karena pada dasarnya petani sudah mempunyai langganan pengepul yang mau membeli salaknya.

Desa Sukoharjo mempunyai pangkuan hutan seluas 97,70 hektar yang terdiri dari dua petak yang dibagi menjadi enam anak petak, yaitu petak 50 dan petak 51 yang dibagi menjadi enam anak petak yaitu anak petak 50A, 50B, 50C, 50F, 51B dan 51C. Dari 6 anak petak tersebut hanya 2 anak petak saja yang sudah resmi (ada perjanjian) dan ditanami salak yaitu petak 50F dan 50C dengan luas masing-masing 8,00 hektar dan 15,10 hektar. Dari 2 anak petak seluas 23,10 hektar dikelola oleh 140 MDH (Masyarakat Desa Hutan) dengan pembagian tidak merata. Pembagian luas lahan pengelolaan disesuaikan berdasarkan kepemilikan lahan sendiri, maksudnya untuk masyarakat yang telah memiliki lahan sendiri yang luas maka akan mendapatkan bagian lahan hutan yang sedikit dibandingkan masyarakat yang memiliki lahan sendiri yang tidak begitu luas. Dalam perjanjian antara LMDH Desa Sukoharjo dengan Perum Perhutani BKPH Kedu Utara Wonosobo, bagi hasil salak adalah (a) bagi hasil berupa uang, (b) persentase bagi hasil dengan rincian untuk MDH sebesar 87,50%, Perhutani 10%, LMDH 1,5%, kas Desa Sukoharjo 0,50%, Kecamatan/Kabupaten 0,50% . Sedangkan bagi hasil mahoni adalah (a) hasil dari penjarangan pertama berupa kayu bakar 100% untuk MDH dan (b) bagi hasil berupa kayu perkakas penjarangan lanjutan yang pertama kali dilakukan setelah kesepakatan perjanjian kerjasama.

Pelaksanaan program *agrosilvikultur* dimulai pada tahun 2003. Dana untuk pembelian bibit salak diperoleh dari Perhutani, akan tetapi dana yang diperoleh untuk membeli bibit salak tidak mencukupi untuk ditanam pada kedua anak petak. Untuk mengatasi itu maka penanaman dilakukan secara bertahap dengan menanam anak petak 50F terlebih dahulu. Kekurangan bibit dibeli sendiri oleh masyarakat dengan swadaya. Saat ini anak petak 50F sudah mulai menghasilkan (berbuah) dan hasilnya untuk MDH sendiri karena bagi hasil belum berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati (2007) dengan analisis *cash flow* diketahui Nilai NPV seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Penghitungan NPV penanaman salak pada program *agrosilvikultur* di Desa Sukoharjo perhektar (15 tahun)

Th ke	87,50% Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Net Benefit (Rp)	Df 13%	PV Penerimaan (Rp)	PV Total Biaya (Rp)	NPV (Rp)
1	0	4.372.211,76	-4.372.211,76	0,885	0	3.869.407,41	-3.869.407,41
2	0	2.210.894,12	-2.210.894,12	0,783	0	1.731.351,18	-1.731.351,18
3	273.652,34	3.241.324,37	-2.967.672,03	0,693	189.668,44	2.246.561,92	-2.056.893,49
4	1.691.669,00	3.205.771,43	-1.514.102,43	0,613	1.037.500,60	1.966.099,62	-928.599,02
5	5.075.007,00	3.221.771,43	1.853.235,57	0,543	2.754.713,80	1.748.777,53	1.005.936,27
6	6.766.676,00	3.381.889,08	3.384.786,92	0,480	3.250.034,48	1.624.321,32	1.625.713,16
7	6.766.676,00	3.253.771,43	3.512.904,57	0,425	2.876.513,97	1.383.178,23	1.493.335,73
8	6.766.676,00	3.336.124,37	3.430.551,63	0,376	2.545.623,51	1.255.049,99	1.290.573,52
9	6.766.676,00	3.253.771,43	3.512.904,57	0,333	2.252.626,44	1.083.180,51	1.169.445,93
10	6.766.676,00	3.253.771,43	3.512.904,57	0,295	1.993.462,75	958.561,06	1.034.901,69
11	5.920.841,50	3.324.289,08	2.596.552,42	0,261	1.543.563,38	866.642,16	676.921,22
12	5.075.007,00	3.172.171,43	1.902.835,57	0,231	1.170.804,11	731.819,95	439.984,17
13	4.229.172,50	3.246.524,37	982.648,13	0,204	863.597,02	662.940,28	200.656,75
14	3.383.338,00	3.156.171,43	227.166,57	0,181	611.369,18	570.320,18	41.049,00
15	1.691.669,00	3.140.171,43	-1.448.502,43	0,160	270.497,87	502.113,41	-231.615,54
	61.173.736,34	48.770.628,59	12.403.107,75		21.200.324,76	21.200.324,76	159.650,79

Sumber: Prasetyowati (2007)

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam 15 tahun masa produktif tanaman salak yang ditanam dalam program *agrosilvikultur* didapat NPV sebesar Rp. 159.650,79. Dari hasil penelitian terbukti bahwa program *agrosilvikultur* memberikan kelayakan finansial bagi masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dimana NPV >0, yaitu sebesar Rp. 159.650,79 perhektar selama jangka waktu 15 tahun.

Keuntungan sosial yang didapatkan dari adanya program *agrosilvikultur* di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berupa kelembagaan, organisasi, solidaritas sosial serta konservasi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 91,09% masyarakat mengaku mendapatkan keuntungan secara kelembagaan, terutama adanya peningkatan dalam swadaya masyarakat, yaitu 84,97%.

Keuntungan sosial yang berupa kelembagaan, organisasi, solidaritas sosial dan konservasi lahan yang diperoleh masyarakat Desa Sukoharjo tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor rata-rata adalah 263,24. Hal ini membuktikan bahwa adanya program *agrosilvikultur* memberikan keuntungan sosial yang tinggi, dimana rata-rata skor yang diperoleh masuk dalam kelas skor 226,36-291. Dari 97 pertanyaan yang diberikan mengenai kelembagaan, organisasi, solidaritas social dan konservasi diperoleh persentase terkecil adalah variabel organisasi yaitu sebesar 89,89%. Sedangkan persentase skor terkecil dari keseluruhan indikator adalah peraturan yang masuk dalam variabel organisasi yaitu sebesar 75,16%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program *agrosilvikultur*. Sehingga mengakibatkan kurang pahamiannya mengenai peraturan, hak dan kewajiban yang berlaku dan harus dijalankan.

KEARIFAN LOKAL: HARUSKAH MENJADI TITIK TOLAK PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT ?

Mencermati hasil penelitian Prasetyowati (2007) diatas secara perhitungan model *agrosilvikultur* yang dikembangkan PT. Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo dapat ditarik satu benang merah bahwa telah terjadi sinergi antara pelaku pengelolaan sumberdaya hutan. Sistem *agrosilvikultur* dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian secara sadar dan dengan pertimbangan yang masak. Tanaman pokok atau tegakan dari program ini adalah tanaman mahoni yang ditanam pada tahun 1998 dan tanaman pertanian yang ditanam adalah tanaman salak serta sebagian ikut pula menanam tanaman kemukus yang menjadikan pohon mahoni sebagai obyek rambatannya. Pola tanamnya adalah dengan menanam salak pada sela-sela pohon mahoni dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Pemilihan jenis tanaman tersebut melalui beberapa pertimbangan, yaitu faktor biofisik, pasar, masyarakat dan ekonomis. Secara biofisik tanaman salak merupakan komoditas primadona (disukai) di daerah ini karena sebagian besar penduduknya menanam salak di lahan pekarangan masing-masing dan buah salak yang dihasilkan daerah ini kualitasnya baik. Selain itu perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain; hasil yang diperoleh mudah atau tidak dipasarkan, harga pasar atas produksi yang dihasilkan, keadaan mata rantai pemasaran, sarana jalan, baik atau tidak dan alat transportasi mudah atau tidak. Kondisi biofisik tersebut

telah teramati oleh ketiga pelaku pengelolaan hutan sehingga memudahkan dalam pengembangannya.

Setelah terpilih beberapa jenis tanaman melalui biofisik, selanjutnya perlu diperhatikan dengan faktor pasarnya. Dengan memperhatikan faktor pasar maka jenis tanaman yang terpilih akan lebih terseleksi lagi. Kondisi di Desa Sukoharjo menunjukkan bahwa harga buah salak cukup bersaing, dalam pemasarannya mudah karena pada dasarnya petani sudah mempunyai langganan pengepul yang mau membeli salaknya.

Disamping faktor yang telah disebutkan di atas, petani sering mempertimbangkan faktor lain dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Seperti teknologi yang dikuasai atau tanaman yang akan ditanam sudah turun temurun disukai masyarakat. Pada dasarnya jenis tanaman yang disukai/dipilih petani menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Penduduk setempat sudah menguasai bagaimana budidaya tanaman salak yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar penduduknya menanam salak di lahan pekarangan masing-masing.

Faktor keempat adalah nilai ekonomi yang merupakan salah satu faktor penting pula dalam pemilihan jenis tanaman, karena hal ini terkait dengan pendapatan akhir petani dari hasil usahatani jenis-jenis tanaman yang dipilih. Dalam 15 tahun masa produktif tanaman salak yang ditanam dalam program *agrosilvikultur* perkiraan NPV sebesar Rp. 159.650,79. Dari hasil penelitian terbukti bahwa program *agrosilvikultur* memberikan kelayakan finansial bagi masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Memperhatikan keempat faktor tersebut nampak bahwa sinergi ketiganya memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang tercermin dari budidaya salak oleh masyarakat kemudian dijadikan tanaman sela bagi mahoni miliki perhutani. Hutan mahoni tidak akan mengalami gangguan dengan adanya tanaman salak, sementara masyarakat tidak perlu diperkenalkan atau diintroduksi dengan tanaman baru yang membutuhkan masa adaptasi yang bisa pendek bisa pula panjang, sehingga dapat terjadi kemungkinan ditolaknya tanaman tersebut oleh masyarakat.

Pemilihan tanaman salak juga berimbas pada psikososial masyarakat setempat untuk tidak merusak hutan. Dengan berdampingannya tanaman mahoni dan salak memberi efek psikososial bahwa merusak salah satu tanaman berarti juga merusak tanaman lainnya. Merusak tanaman mahoni akan berakibat rusaknya tanaman salak. Rusaknya tanaman salak akan berakibat berkurangnya pendapatan petani dari usahatannya, yang dapat berakibat penurunan tingkat kesejahteraan petani atau tetapnya petani pada kondisi kemiskinan ekonomi. Inilah sebenarnya sasaran konservasi dan peningkatan kesejahteraan atau

pengentasan kemiskinan yang tercapai dengan adanya *agrosilvikultur* antara mahoni dan salak.

Keuntungan sosial yang didapatkan dari adanya program *agrosilvikultur* di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berupa kelembagaan, organisasi, solidaritas sosial serta konservasi lahan terbilang tinggi. Pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan dan organisasi memberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa petani tidak sendiri atau masyarakat tidak hidup sendiri, tetapi juga hidup berdampingan dengan orang lain dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kondisi ini akan memberikan pemahaman yang utuh bahwa sumberdaya hutan perlu dikelola secara professional dan terintegrasi dengan pihak lain.

Solidaritas sosial yang memang sudah ada dalam masyarakat semakin dikuatkan dengan program *agrosilvikultur* ini. Masyarakat semakin menyadari bahwa dalam kehidupan muthlak diperlukan suatu solidaritas sosial. Terganggunya solidaritas sosial akan mempengaruhi terganggunya kehidupan masyarakat dan lingkungan. Masyarakatpun harus bersolidaritas sosial dengan hutan, agar sumberdaya hutan dapat lestari.

Namun dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variabel organisasi memiliki persentase skor terkecil dari keseluruhan indikator, yaitu hanya 75,16%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program *agrosilvikultur*. Sehingga mengakibatkan kurang pahamiya mengenai peraturan, hak dan kewajiban yang berlaku dan harus dijalankan.

Sebenarnya dalam PHBM selain dibentuk LMDH juga dibentuk suatu Forum Komunikasi (FK) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Di Desa Sukoharjo sudah terbentuk suatu Forum Komunikasi tingkat Desa walaupun belum ada surat keputusannya yang mengesahkan forum tersebut, tetapi sampai program ini sudah berjalan 3 tahun belum terbentuk forum komunikasi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota. Menurut pihak PT. Perhutani (persero), belum terbentuknya Forum Komunikasi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota ini disebabkan karena kesulitan dalam mengkoordinasi pembentukan Forum Komunikasi.

Belum terbentuknya Forum Komunikasi juga mengakibatkan tidak adanya pemantauan secara resmi dari pihak PT. Perhutani (Persero) maupun dari pemerintah. Secara langsung dengan tidak adanya pemantauan inilah maka tidak ada laporan secara jelas. Kalau tidaka ada laporan secara jelas tentunya sulit untuk mengukur keberhasilan dan kesuksesan suatu program. Demikian pula dalam pelaksanaan bagi hasil, kalau tidak ada pemantauan secara

jelas, bagaimana pihak PT. Perhutani (Persero) dapat mengetahui hasil panen salak yang sebenarnya, hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berupa ketidakjujuran mengenai hasil panen sehingga akan mengurangi proporsi bagi hasil yang diperoleh PT. Perhutani (Persero), Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kurangnya komunikasi antara PT. Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo yang tergabung dalam LMDH Wana Karya dan mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang sebaiknya segera dilakukan suatu koordinasi untuk pembentukan Forum Komunikasi PHBM. Pembentukan Forum Komunikasi ini sangat penting karena kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama dalam jangka panjang dan untuk kesuksesan PHBM untuk mewujudkan tujuan bersama demi terciptanya kelestarian sumberdaya hutan.

PENUTUP

Bertitik tolak dari kondisi pengelolaan agrosilvikultur yang dikembangkan PT. Perhutani (Persero), Pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo nampaknya masih diperlukan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Titik tolak pengembangan tersebut hendaknya tidak berlawanan dengan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu kearifan lokal, baik kearifan dalam aspek perhutanan, ekonomi dan sosial. Dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan diharapkan hutan akan terjaga kelestariannya, karena hutan merupakan rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Clive Gray, Payaman Simanjuntak, Lien.K Sabur, P.F.L.Maspaitella dan R.C.G. Varley. 2002. *Pengantar Evaluasi Proyek*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992. *Lingkungan Hidup*. Bumi Aksara, Jakarta.
- H de Foresta, A Kusworo, G Michon dan WA Djatmiko. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan - Agroforest Khas Indonesia – Sumbangan Masyarakat Bagi Pembangunan Berkelanjutan*. International Centre for Reseach in Agroforestry, Bogor, Indonesia; Institut de Recherche pour le Developpement, France; dan Ford Foundation, Jakarta, Indonesia.
- Lincoln, Arsyad, 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Monografi Pertanian Kecamatan Sukoharjo*. 2005. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

- Muhtadi, D., 2003. *Derita Sepanjang Masa Rakyat Jawa*. Harian Kompas, 9 Pebruari. PT. kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nazir,1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Presetyowati, Endah. 2007. *Analisis Sosial Ekonomi Agroforestry Di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah*. Jurusan Sosial Ekonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yoayakarta.
- Sabarnuddin, Sambas.2001. *Rekonsiliasi Nasional Untuk Menyelamatkan Hutan*. Makalah Presentasi Kelompok Pada Kongres Kehutanan Indonesia III. Jakarta: 1-11.
- Singaribun M dan Sofyan E. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3S. Jakarta.
- BPS. 2002. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta. Indonesia.
- Suparmoko, 1994, *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. BPFE. Yogyakarta.
- Sutardjo, Djojo. 2005. *Bahan Ajar Materi Rancangan Agroforestry*. Balai Diklat Kehutanan kadipaten. Departemen Kehutanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan.
- Syahyuti. 2003. *Alternatif Konsep Kelembagaan Untuk Penajaman Operasionalisasi Dalam Penelitian Sosiologi*. Jurnal forum Penelitian Agroekonomi, FAE, Volume 21, No. 2. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Anonim. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. [www. Dinashut – Jateng. go.id](http://www.Dinashut-Jateng.go.id) . (13 Mei 2006).

Ucapan Terima Kasih

Kepada Endah Prasetyowati, SP yang telah mengijinkan penulis sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi dan menggunakan sebagian data yang diperlukan untuk penulisan makalah ini.